

**PERAN APARAT KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN KEDAUNG KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**Cindy Aulia Kamal
1916021022**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS IN EMPOWERING KEDAUNG VILLAGE COMMUNITIES BANDAR LAMPUNG CITY

By

CINDY AULIA KAMAL

There are officials who are lazy because of the lack of awareness of Kedaung Village officials in community empowerment. There is a significant gap between expectations and reality in the involvement and support of kelurahan officials. This study aims to analyze the role of the Kedaung Village apparatus in the implementation of community empowerment in Kedaung Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in research are observation, interviews and documentation. This study was analyzed using Soekanto's role theory (2012: 213), namely roles include norms associated with a person's position or place in society; behavior carried out by individuals in society as an organization; and individual behavior that is important to the social structure of society. The results of the study found that the Kedaung Village apparatus played a role in community empowerment, seen from the three indicators, namely the norms of the Kedaung Village apparatus which became the basis for community empowerment, namely openness and transparency, justice and equality, active community participation, sustainability and responsibility, collaboration and partnership and responsive to community needs. These norms have been successfully implemented and used as a benchmark in implementing the role of apparatus in community empowerment. The behavior of Kedaung Kelurahan officials has been successful in empowering the community, although it is considered weak because no data has been found to support arguments. However, efforts to increase community participation, identification of problems and needs, program planning, program implementation, as well as evaluation and monitoring carried out by village officials have had a positive impact and empowered the community effectively. The important behavior of individuals in the social structure of society has been successful which is reflected in the positive impact felt by the community. Communities experience increased access to public services, improved quality of life, increased participation in decision-making, and increased involvement in social and economic activities.

Keywords: Role, Apparatus, Empowerment.

ABSTRAK

PERAN APARAT KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDAUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

CINDY AULIA KAMAL

Terdapat aparat yang bermalasan karena kurangnya kesadaran aparat Kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan dan realitas dalam keterlibatan dan dukungan aparat kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat Kelurahan Kedaung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedaung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran Soekanto (2012: 213) yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; perilaku yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa aparat Kelurahan Kedaung berperan dalam pemberdayaan masyarakat, dilihat dari ketiga indikator, yaitu norma aparat Kelurahan Kedaung yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu keterbukaan dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan dan tanggung jawab, kolaborasi dan kemitraan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Norma-norma tersebut berhasil diimplementasikan dan dijadikan patokan dalam pelaksanaan peran aparat dalam pemberdayaan masyarakat. Perilaku aparat Kelurahan Kedaung telah berhasil dalam pemberdayaan masyarakat walaupun dinilai lemah karena tidak ditemukannya data sebagai penguat argumentasi. Tetapi, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh aparat kelurahan telah memberikan dampak positif dan memberdayakan masyarakat secara efektif. Perilaku penting individu dalam struktur sosial masyarakat telah berhasil yang tercermin dalam dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasakan peningkatan akses terhadap layanan publik, peningkatan kualitas hidup, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan keterlibatan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Peran, Aparat, Pemberdayaan.

**PERAN APARAT KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN KEDAUNG KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Cindy Aulia Kamal

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERAN APARAT KELURAHAN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYRAKAT KELURAHAN
KEDAUNG KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Cindy Aulia Kamal**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021022**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 196007291990101001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



Penguji : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Agustus 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan



Cindy Aulia Kamal
NPM. 1916021022

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Cindy Aulia Kamal, dilahirkan di Bandar Lampung, pada 08 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Muhammad Kamaludin dan Ibu Anita Sari Juwita. Penulis memiliki satu orang adik perempuan bernama Cecha Amelia Kamal yang sedang menempuh Pendidikan di SMP Negeri 31 Bandar Lampung.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari tahun 2006-2007 di TK Aulia, Selanjutnya penulis bersekolah dasar di MIN Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2007-2013 Selanjutnya penulis menempuh Pendidikan SMP Negeri 21 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Yang selanjutnya pada tahun 2019 penulis langsung melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2019.

Selama masa perkuliahan penulis pernah bergabung dalam satu organisasi di Jurusan Ilmu Pemerintahan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HMJ IP) Periode 2020/2021 dan Periode 2021/2022. Dalam organisasi ini, jabatan penulis pada periode 2020/2021 adalah sebagai Anggota Biro 4 dan pada periode 2021/2022 jabatan penulis yaitu Ketua Biro 4. Selanjutnya dalam melaksanakan perkuliahan, penulis pernah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Kemiling, Kelurahan

Sumber Rejo, Kota Bandar Lampung. Penulis juga telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung selama 6 (enam) bulan.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Aparat Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedaung, Kota Bandar Lampung” yang dibimbing oleh Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. dan sebagai Penguji adalah Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.

MOTTO

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”

(Albert Einstein)”

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

“Kunci Keberhasilan Yang Sebernarnya adalah Konsisten”

(B.J. Habibie)

“Berbuat Baiklah Tanpa Perlu Alasan”

(Cindy Aulia Kamal)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu,
sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak
skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Muhamamad Kamaludin dan Anita Sari Juwita

Adikku Tersayang

Cecha Amelia Kamal

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Skripsi dengan judul **“Peran Aparat Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedaung Kota Bandar Lampung”** ini dapat diselesaikan berkat partisipasi, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M..Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya tentang perkuliahan. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Jurusan dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.

7. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luangnya dan memberikan saran serta masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik, Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Penguji yang telah banyak membantu dalam proses revisi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih karena bapak telah banyak membantu dan memberikan masukan yang sangat berarti untuk selesainya skripsi ini. Semoga bapak selalu sehat dan dilindungi disetiap langkahnya oleh Allah SWT.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan atas ilmu yang diberikan selama penulis melaksanakan studi, baik materi akademik maupun motivasi untuk masa yang akan datang.
10. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela dan Bang Puput. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Penjaga gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mas Dede dan Mas Cecep. Terima kasih sudah membantu penulis dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar maupun ujian penulis, Semoga sehat selalu dan dilindungi Allah SWT dalam setiap langkahnya.
12. Seluruh Pegawai dan jajaran staf pada Kelurahan Kedaung Kota Bandar Lampung yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan kegiatan PKL sekaligus bersedia menjadi tempat untuk objek penelitian bagi penulis. Terimakasih telah membantu penulis dalam mencari data-data pendukung untuk penyelesaian skripsi ini.
13. Kedua orang tuaku tercinta, yaitu Bapak Muhammad Kamaludin dan Ibu Anita Sari Juwita yang telah memberikan segala pengorbanan yang tidak akan terbalaskan oleh apapun, motivasi, harapan, material dan spiritual, do'a,

semangat, pengertian, kesabaran, kasih sayang, serta pelukan hangat yang membuat penulis kembali merasa lebih nyaman dan tegar selama menjalani pendidikan dan penyelesaian skripsi di Universitas Lampung.

14. Alm. Kakekku dan Nenekku tercinta, yaitu Bapak Abu Yazed dan Ibu Hasnaila. Mereka merupakan sosok kakek dan nenek yang sangat mencintai anak dan cucunya. Terimakasih karena selalu membuat penulis teringat akan kenangan indah dan segala kebaikan yang diajarkan kepada penulis serta kasih sayang yang melimpah yang diberikan kepada penulis, sehingga ketika mengingat semua kenangan itu penulis semakin semangat untuk segera lulus dan menyelesaikan skripsi ini dan membuktikan kepadanya bahwa cucunya sudah berhasil menyelesaikan pendidikan kuliah S1 dengan cukup baik. Terimakasih banyak semoga alm. Kakek dan Nenek disana mendapatkan tempat terbaik disisi-Nya.
15. Kepada adikku tersayang Cecha Amelia Kamal yang selalu memberikan energi dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi. Semoga adikku selalu sehat, dilancarkan segala urusannya, berbakti kepada orang tua dan selalu jadi anak yang penurut.
16. Kepada Semua Sepupu tercinta yang selalu lucu dan terus memberikan semangat karna tingkah laku lucunya sehingga penulis selalu merasa bersemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Seluruh Om-om dan Tante-tante penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Seluruh Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan terkhusus Rizal Efendi, Wenti, Fitri, Farhan yang telah banyak membantu dan juga memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi penulis ini. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT dimanapun kalian berada.
20. Kepada Sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini. Terimakasih Ananda Meidina Zahra, S.I.P yang selama ini sudah berjuang bersama dan saling menyemangati satu sama lain. Semoga silaturahmi kita akan terus terjaga

serta selalu diberikan semangat untuk masa yang akan datang serta diberikan kesuksesan oleh Allah SWT dan selalu dilindungi dimanapun berada.

21. Kepada seluruh teman-teman HMJ yang sudah berjuang bersama dan saling mendukung dalam proses menjalankan tugas organisasi bersama, terimakasih sudah menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
22. Kepada seluruh anggota Biro 4 yaitu, sekertaris saya Sri Mulyani, anggota saya Annisa Asma, Suci Lala, Tegas adli, Christian Krisna, M. Panji, M. Yuan, dan M. Fadlan. Terimakasih banyak sudah menemani dan membantu saya dalam menjalankan tugas di HMJ, selalu mendukung dan menyamangti saya dalam menjalankan berbagai tugas, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dengan mudah saat di HMJ, semoga kedepannya kita selalu menjaga hubungan silaturahmi.
23. Kepada seluruh teman-teman KKN saya terimakasih sudah saling mendukung dan masih menjaga hubungan baik hingga sekarang.
24. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir sampai sekarang. Semoga kita dipertemukan lagi dilain kesempatan dan semoga kita semua dapat mencapai apa yang kita mimpikan dan dapat membanggakan keluarga.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2023

Cindy Aulia Kamal

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Peran.....	13
2.1.1 Pengertian Peran	13
2.1.2 Fungsi Peran	20
2.1.3 Jenis-Jenis Peran	20
2.1.4 Struktur Peran	21
2.2 Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat.....	22
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	22
2.2.2 Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	24
2.3 Tinjauan Aparat/Aparatur.....	26
2.4 Kerangka Pikir.....	29
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Fokus Penelitian.....	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Jenis Data Penelitian	35
3.5 Informan.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Pengolahan Data	41
3.8 Teknik Analisis Data.....	41
IV. GAMBARAN UMUM	43
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kedaung	43
4.1.1 Luas Wilayah.....	43

4.1.2 Batas Wilayah	44
4.1.3 Kondisi Geografis	44
4.1.4 Orbitrasi.....	44
4.1.5 Tingkat Kesuburan Tanah	45
4.1.6 Sumber Daya Air.....	45
4.2 Potensi Penduduk	45
4.3 Bidang Kesejahteraan Masyarakat	49
4.3.1 Tingkat Kecakupan Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi	49
4.3.2 Tingkat Perekonomian Masyarakat.....	50
4.3.3 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	50
4.3.4 Program Pemberdayaan Masyarakat	50
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Norma Aparat Kelurahan Kedaung dalam Pemberdayaan Masyarakat..	53
5.2 Perilaku Aparat Kelurahan Kedaung dalam Pemberdayaan Masyarakat	67
5.3 Perilaku Penting Individu dalam Struktur Sosial Masyarakat	83
VI. SIMPULAN DAN SARAN	93
6.1 Simpulan.....	93
6.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Informan	36
2. Nama-Nama Lurah di Kelurahan Kedaung.....	43
3. Jumlah Penduduk Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4. Jumlah Penduduk Kelurahan Berdasarkan Jumlah KK dan Jumlah Rumah	46
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama	46
6. Jumlah Penduduk Menurut Usia	47
7. Jumlah Perpindahan Penduduk (Mutasi).....	47
8. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	47
9. Jumlah Penduduk Wajib Belajar 9 Tahun dan Angka Putus Sekolah.....	48
10. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	48
11. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan	48
12. Jumlah Sarana Keagamaan.....	48
13. Tingkat Kecakupan Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi	49
14. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	50
15. Kemudahan Akses Pendidikan Per Kelurahan di Kemiling.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	31
2. SKP Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	58
3. Forum Pertemuan dan Diskusi	62
4. Pemberian Pemahaman oleh Aparat Kelurahan Kedaung	53
5. Tim Khusus dan Masyarakat Kelurahan Kedaung.....	70
6. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Wirausaha.....	76
7. Musrenbang Desa	77
8. Pasar Murah.....	78
9. Pemberian Bantuan Pinjaman Usaha	79
10. Gotong Royong	80
11. Pembinaan Karang Taruna	81
12. Kegiatan-Kegiatan Kelurahan Kedaung.....	86
13. Aparat Kelurahan Kedaung dengan <i>Stakeholder</i>	89

DAFTAR SINGKATAN

Musrenbang Desa	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
PP	: Peraturan Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
RT	: Rukun Tetangga
LK	: Lingkungan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional (Iskandar, 2020: 21). Sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya.

Adanya kebijakan ini pemerintah daerah perlu memfokuskan penerapan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi lebih mandiri sehingga dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat atau sering disebut dengan istilah pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (*power*) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan (Widjajanti, 2011: 103). Poros dalam pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya terletak pada kegiatan yang dilakukannya saja namun partisipasi

aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan juga memberikan pengaruh yang signifikan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana melalui tahapan pembangunan yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Deswimar, 2014: 42). Paradigma pembangunan baru menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas inisiatif dan dorongan dari masyarakat. Sehingga masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pembangunan di kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional dimana yang diketahui sebagian besar masyarakat Indonesia ada di kelurahan dengan berbagai profesinya, jadi sudah kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemahaman akan pentingnya Pembangunan di kelurahan sebagai pilar keberhasilan pembangunan nasional menjadi semakin jelas. Kelurahan Kedaung dengan komposisi penduduk yang sebagian besar masih mengandalkan berbagai profesi di sektor pertanian dan usaha kecil, memiliki peran vital dalam menyumbangkan kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan.

Sebagai kelurahan yang menggambarkan keberagaman profesi dan latar belakang masyarakat desa di Indonesia, Kelurahan Kedaung menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan memulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan akses pendidikan, Kelurahan Kedaung

menguatkan fondasi yang solid untuk pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah Kelurahan Kedaung perlu memberikan perhatian khusus pada pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung konektivitas internal dan eksternal. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan akses listrik bukan hanya mempermudah mobilitas penduduk, tetapi juga merangsang pertumbuhan usaha dan aktivitas ekonomi lokal.

Pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian berkelanjutan dan usaha mikro, adalah langkah penting menuju kesejahteraan yang lebih baik. Melalui pelatihan dan dukungan teknis, masyarakat Kelurahan Kedaung dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Di samping itu, pendekatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan membantu memastikan kelangsungan lingkungan yang sehat dan lestari. Sebagai kelurahan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, sosial, dan ekologi, Kelurahan Kedaung berpotensi menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam era teknologi informasi yang semakin maju, pemanfaatan informasi dan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam memberdayakan masyarakat Kelurahan Kedaung.

Dengan bekerja bersama, baik pemerintah dan masyarakat, Kelurahan Kedaung dapat mengarahkan upaya pembangunan ke arah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan menyeluruh. Melalui sinergi ini, Kelurahan Kedaung akan semakin mendekati visi pemberdayaan yang lebih baik untuk masyarakatnya dan menjadi bagian penting dalam kesuksesan pembangunan nasional.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, mengontrol lingkungannya dan dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya (Balqis, 2023: 40). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan

kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada lingkup pemerintah menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab begitu pun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Salah satu peranan penting pemerintah desa atau kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pembangunan desa yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang. Musrenbang desa yang dilakukan sebagai bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat hanya sekadar tuntutan tugas semata.

Pemerintah desa harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi pelaksanaan atau implementasi pada proses pembangunan (Simbolon, dkk, 2021: 295). Dalam konteks Kelurahan Kedaung, peran pemerintah desa menjadi sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan dan implementasi proses pembangunan. Pemerintah desa memiliki tanggung

jawab dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memimpin berbagai inisiatif yang mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan komunitas. Hal ini mencakup pengaturan sumber daya, merancang kebijakan pembangunan, melaksanakan program dan proyek, mendorong partisipasi masyarakat, serta memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam menggalang dukungan dari berbagai pihak dan menjadi suara masyarakat dalam forum yang lebih luas. Melalui peran yang aktif dan efektif ini, pemerintah desa di Kelurahan Kedaung dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan ekologi di wilayah tersebut.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Daerah-Daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah nagara Republik Indonesia. Kelurahan menjadi salah satu instansi pemerintah yang memiliki hak dan wewenangnya sendiri untuk mengurus persoalan masyarakat yang ada didaerahnya, salah satunya yaitu Kelurahan Kedaung yang berada di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah kelurahan diatur Penyelenggaraan pemerintahannya dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lurah akan bekerjasama dengan beberapa anggota ASN lainnya yang sudah memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Yaitu Sekretaris lurah yang memiliki tugas mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian, Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang urusan pemerintahan dan pertanahan serta pemberdayaan masyarakat,

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban kelurahan.

Sebagai bahan referensi atas penulisan ini maka Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Muh. Zulkarnain (2018) dengan judul Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian ini adalah Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona diwujudkan dengan empat garis besar yakni Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Keempat indikator tersebut sudah dijalankan sesuai dengan peranan masing-masing.

2. Mirna Andriani (2015) dengan judul Peran Pemerintah Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Hasil penelitian pemerintah Kelurahan Takalar sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terutama sebagai fasilitator dengan pemerintah kabupaten dan program-program pemberdayaan nasional, karena pemerintah kelurahan merupakan level pemerintahan terbawah yang mengetahui keadaan sebenarnya dari warga masyarakatnya terutama di bidang sosial budaya dan ekonomi, kesehatan maupun pendidikan, akan tetapi tingkat pendidikan warga masyarakat yang tinggi belum menjamin kesejahteraan warga dibidang pendidikan.
3. Heny Wahyu Saputro (2008) dengan judul Peranan Pemerintah mengenai Kelurahan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Tentang Pelaksanaan Program Kredit Petani Miskin (KPM) di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban). Hasil penelitian tersebut Pemerintah Kelurahan Mondokan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator antara petani dengan pihak pemberi bantuan dalam hal ini pemerintah daerah. Fungsi tersebut mendorong masyarakat dapat secara mandiri dalam memberdayakan perekonomiannya.
4. Murodi Yahya Kasani (2011) dengan judul Peran Kepala Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kelurahan Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran kepala kelurahan Tebon dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan jalan memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin kelurahan dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan kepala kelurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, melakukan rebug lingkungan secara terprogram, melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, melakukan rebug kelurahan secara periodik dan memanfaatkan potensi yang ada di dalam masyarakatnya.

5. Tutik Haryani dan Siska Kuswoyo (2022) dengan judul Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan 2) Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari: Faktor pendukung dalam pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan tingkat pendidikan, Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.
6. Gita Andini, Dadan Kurniansyah dan Kariena Febriantini (2022) dengan judul Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai peran regulator, pemerintah kelurahan belum memiliki peraturan sekaligus arahan khusus terkait BPNT dan PKH. Sebagai peran dinamisator yaitu mampu mengadakan kegiatan pelatihan. Sebagai peran fasilitator yaitu hanya mampu memberikan bantuan berupa barang saja. Sebagai peran katalisator yaitu belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan belum melakukan promosi potensi wilayah.
7. Ahmad dan Nur Afni (2022) dengan judul Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Nelayan (Kelompok Nelayan) di Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini adalah pemerintah Kelurahan Takatidung memiliki peran penting dalam kelancaran kegiatan nelayan dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang sangat menunjang keberhasilan dan kemudahan para nelayan dalam proses penangkapan ikan, walaupun memiliki kendala dengan harusnya membentuk sebuah kelompok agar dapat mendapat bantuan tersebut. adapun faktor yang mempengaruhi peran pemerintah kelurahan dalam

kelompok ini proses sosialisasi berlangsung, sehingga manusia menjadi dewasa dan mampu menyesuaikan diri. dengan demikian, hampir dari seluruh waktu dalam kehidupan sehari-hari dihabiskan melalui interaksi dalam kelompok, dididik dalam kelompok, belajar di dalam kelompok, bekerja di dalam kelompok, dan beraktivitas di dalam kelompok. dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada setiap perkembangannya, manusia membutuhkan kelompok.

8. Gregerius Edo Marpaung (2022) dengan Judul Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Balon Kabupaten Simalungun). Hasil penelitian menemukan bahwa Peranan Pemerintahan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu pembangunan atau perubahan di lingkungan kelurahan dilakukan dengan program pemerintah yaitu Pemberdayaan melalui bina masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Dan juga melakukan Pemberdayaan melalui Bina lingkungan yang baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial, pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan semangat gotong royong.
9. Julianto Salonga Palangan (2020) dengan judul Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mentirotiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Mentirotiku dalam pemberdayaan pada aspek bina manusia, tidak pernah melakukan program pelatihan pengembangan keterampilan atau penyuluhan kepada masyarakat. Pada aspek bina usaha, pihak pemerintah Kelurahan Mentirotiku tidak pernah memberikan bantuan kepada masyarakat. Pada aspek bina lingkungan, pihak Pemerintah Kelurahan Mentirotiku senantiasa menjalin koordinasi dengan masyarakat agar menjaga dan melestarikan lingkungan. Pada aspek bina kelembagaan, pihak Pemerintah Kelurahan Mentirotiku membuat sebuah lembaga yang

mengelola program pemberdayaan tersebut namun belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada peranan aparat Kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi serangkaian masalah yang berulang kali muncul dalam pemberdayaan masyarakat. Masalah-masalah ini mencakup sejumlah aspek yang merentang dari kurangnya kesadaran akan peran yang diemban oleh aparat kelurahan Kedaung dalam mengakselerasi proses pemberdayaan masyarakat hingga perhatian terhadap perilaku aparat yang cenderung bermalas-malasan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Keadaan ini memperlihatkan adanya gap yang signifikan antara harapan dan realitas di lapangan, di mana ekspektasi terhadap keterlibatan dan dukungan yang konstruktif dari aparat kelurahan belum sepenuhnya terpenuhi.

Kondisi ini mendorong perlunya penelitian yang lebih terfokus dan komprehensif. Dalam hal ini, pemilihan lokasi penelitian di Kelurahan Kedaung dianggap sebagai langkah yang tepat dan strategis. Kelurahan Kedaung memiliki sejumlah karakteristik yang relevan dengan permasalahan yang ingin diungkapkan oleh penelitian ini. Tingkat interaksi yang tinggi antara aparat kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Kedaung menjadi peluang untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran aparat kelurahan seharusnya diterjemahkan dalam pemberdayaan masyarakat dan sejauh mana kenyataan di lapangan mencerminkan hal tersebut.

Ketidakmerataan dalam pemberdayaan masyarakat mungkin telah menyebabkan rasa ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan warga. Dengan memusatkan perhatian pada Kelurahan Kedaung, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kesenjangan antara tujuan deklaratif aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan apa yang sebenarnya dialami oleh warga sehari-hari. Selain

itu, keterlibatan dalam masyarakat yang lebih luas juga memberikan peluang untuk mendokumentasikan dan menganalisis perilaku aparat kelurahan yang mungkin mencerminkan kurangnya motivasi atau tanggung jawab.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas isu-isu yang berkaitan dengan peran aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi solusi yang berpotensi untuk memperbaiki kondisi yang ada dan merumuskan rekomendasi yang lebih baik dalam mengoptimalkan kinerja aparat kelurahan, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung dan mempromosikan pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Aparat Kelurahan Kedaung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedaung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Aparat Kelurahan Kedaung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedaung

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan bidang ilmu politik dan untuk meneruskan pendapat gagasan penjelasan dan anggapan mengenai peran aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama bangku perkuliahan dengan praktiknya di lapangan.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah untuk mendukung khazanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya tentang peran aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

c. Bagi Kelurahan Kedaung

Penelitian ini memberikan gambaran, pandangan, dan masukan pada kajian peranan aparat Kelurahan Kedaung dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. Serta sebagai Kontrol Masyarakat terhadap Peran aparat Kelurahan dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan oleh individu yang mengisi posisi tertentu dalam suatu struktur sosial. Peran merupakan konsep sosial yang dihasilkan dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu menginternalisasi dan memahami peran yang diharapkan dari posisi sosial yang mereka miliki, dan selanjutnya memainkan peran tersebut dalam interaksi sosial dengan orang lain. (Koentjaraningrat, 2014: 25).

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Menurut Soekanto (2012: 213) peran adalah proses dinamis kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Peranan tersebut mencakup tiga hal penting sebagai indikator untuk mengetahui seseorang menjalankan peranannya atau tidak (berperan atau tidak berperan), yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran dalam konteks norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merujuk pada serangkaian aturan dan tindakan yang mengarahkan individu dalam interaksi sosial dan kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma ini memberikan panduan tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku, berinteraksi, dan memainkan peran mereka dalam masyarakat. Peran dalam arti ini mencakup berbagai aspek, seperti peran sebagai anggota keluarga, warga negara, tetangga, atau pekerja. Setiap peran ini memiliki norma-norma yang diharapkan untuk diikuti oleh individu yang menjalankan peran tersebut. Misalnya, sebagai anggota keluarga, individu diharapkan untuk memberikan dukungan, saling menghormati, dan menjaga harmoni dalam hubungan keluarga. Sebagai warga negara, individu diharapkan untuk mematuhi hukum, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan menghormati hak-hak orang lain.

Norma-norma ini juga mengatur hubungan sosial antara individu dengan orang lain di masyarakat. Mereka menentukan bagaimana individu seharusnya berinteraksi dengan tetangga, teman, atau rekan kerja. Norma-norma ini mencakup aspek-etika, kesopanan, dan penghargaan terhadap keberagaman sosial dalam masyarakat. Peran meliputi norma-norma ini memberikan kerangka kerja yang penting dalam menjaga kohesi sosial dan membangun hubungan yang sehat antara individu-individu dalam masyarakat. Mereka membantu menjaga harmoni, saling pengertian, dan saling menghormati dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan mengikuti norma-norma ini, individu dapat memainkan peran mereka dengan

baik dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan kemasyarakatan.

Dengan memahami makna peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, individu dapat lebih baik memahami tanggung jawab mereka, berinteraksi dengan orang lain secara efektif, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Makna peran dalam konteks perilaku individu dalam masyarakat sebagai organisasi merujuk pada konsep yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari individu dalam menjalankan fungsinya dalam suatu struktur sosial. Peran ini mencakup serangkaian tindakan dan sikap yang dilakukan oleh individu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam konteks ini, individu-individu diharapkan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang peran mereka dalam organisasi masyarakat. Mereka harus mengetahui tugas-tugas yang harus dilakukan, tanggung jawab yang harus diemban, dan perilaku yang diharapkan dari mereka dalam melaksanakan peran tersebut. Misalnya, dalam lingkup organisasi masyarakat seperti kelurahan, individu-individu dapat memiliki peran sebagai aparat pemerintahan, anggota tim penggerak masyarakat, atau fasilitator program pemberdayaan.

Pelaksanaan peran ini melibatkan berbagai tindakan konkret yang dilakukan oleh individu, seperti mengumpulkan informasi, berkoordinasi dengan rekan kerja, berkomunikasi dengan masyarakat, memfasilitasi kegiatan partisipatif, mengambil keputusan, dan melaksanakan program pemberdayaan. Dalam

setiap tindakan dan sikap mereka, individu harus mencerminkan komitmen terhadap norma-norma yang berlaku dalam organisasi masyarakat, seperti keterbukaan, transparansi, keadilan, partisipasi aktif, dan tanggung jawab. Pemahaman dan pelaksanaan peran yang baik oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi penting untuk menjaga efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat. Ketika setiap individu menjalankan perannya dengan baik, sinergi dan kolaborasi antara anggota masyarakat dapat terwujud, dan tujuan bersama dalam pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan lebih baik.

Dengan memahami makna peran sebagai konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi, individu dapat lebih siap dan terampil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat, dan berkontribusi secara positif dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Makna peran dalam konteks perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat merujuk pada peran yang dimainkan oleh individu dalam memenuhi tugas, tanggung jawab, dan harapan sosial yang ditetapkan dalam suatu struktur sosial. Peran individu dalam masyarakat merupakan bagian integral dari sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga keteraturan, stabilitas, dan keharmonisan dalam interaksi sosial. Peran individu mencakup perilaku dan tindakan yang diharapkan dari mereka berdasarkan posisi atau tempat mereka dalam masyarakat. Setiap individu memiliki peran yang unik tergantung pada faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka. Peran tersebut dapat mencakup

tugas, norma, nilai, dan harapan yang harus dipatuhi oleh individu dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya.

Perilaku individu dalam memainkan peran mereka mempengaruhi struktur sosial masyarakat secara luas. Ketika individu melaksanakan peran mereka dengan baik, mereka memberikan kontribusi positif dalam mempertahankan dan memperkuat keteraturan sosial. Perilaku individu yang sesuai dengan norma-norma dan harapan sosial membantu menjaga keselarasan, saling ketergantungan, dan kerjasama dalam masyarakat.

Contohnya, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, aparat kelurahan sebagai individu penting dalam struktur sosial masyarakat memiliki peran dalam menyediakan pelayanan publik, merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan, serta berinteraksi dengan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Dengan memainkan peran mereka secara efektif, aparat kelurahan membantu memperkuat struktur sosial dengan memberikan layanan yang adil, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat, dan menjaga keterbukaan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesimpulannya peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat mencerminkan bagaimana individu memainkan peran mereka dalam memenuhi tugas, tanggung jawab, dan harapan sosial yang ditetapkan dalam suatu sistem sosial. Peran individu mempengaruhi struktur sosial dan keteraturan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, aparat kelurahan merupakan salah satu contoh individu yang memainkan peran penting dalam memperkuat struktur sosial melalui perilaku yang responsif, adil, dan berpartisipasi

Menurut Poerwadarminta (1995: 751) peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.

Berdasarkan pendapat di atas peran adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sarwono (2013: 215) Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Teori peran adalah teori yang “merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013: 224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Suhardono (1994: 15), mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. istilah peran diambil dari dunia teater yang diartikan sebagai seseorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu terkait dengan pemahaman tentang peran

menurut Yeti (2014: 24) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran aktor publik yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan besar. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Yeti (2014: 24) hubungan antar penyediaan sarana dan prasarana dengan tindakan yang ditunjukkan oleh pelaksana program merupakan wujud pengaruh keoptimalan peran aktor publik. indikator berkenaan dengan peran aktor publik terhadap penyediaan sarana dan prasarana diantaranya memiliki pemahaman berupa kebutuhan akan kondisi perkembangan lingkungan serta tanggung jawab atas tugas pihak pengelola program.

2. Ketersediaan anggaran

Dari lingkup pemerintah mana pun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayanan masyarakat. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi.

3. Kemitraan

Prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik.

4. Partisipasi dari masyarakat

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan sorotan utama, karena masyarakat berada pada posisi subyek dan objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2.1.2 Fungsi Peran

Menurut Soekanto (2009: 213-213), fungsi peran adalah sebagai berikut:

1. Peran melengkapi norma-norma yang di hubungkan dengan kedudukan seseorang dengan dalam masyarakat luas, peran dalam artian merupakan susunan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran yaitu suatu konsep mengenai apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai kelompok atau organisasi Peran juga bisa dikatakan sebagai perilaku seseorang yang diperlukan atau penting bagi struktur sosial masyarakat dan institusi tersebut.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010: 160), fungsi peran adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.1.3 Jenis-jenis Peran

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soekanto (2009: 214), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat tentang *developmental practice* dan membutuhkan kolaborasi dengan program-program manajemen sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat pengembangan SDM dirasa penting karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan antara perusahaan.

2.1.4 Struktur Peran

Secara umum, struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang tampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai *provider* (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.

b. Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.2 Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan masyarakat

Konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan yaitu pertama adalah proses pemberdayaan yang menekankan ke proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun *asset* material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua adalah lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya (Kartasasmita, 1996: 58).

Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Komponen utama pemberdayaan dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali dalam menentukan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan (Samah dan Aref, 2009: 63).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto, 2015: 74) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan,

dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Kusumahadi (dalam Sutawa, 2012: 414) menyatakan bahwa program pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber-sumber daya, terpenuhinya kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol sosial terhadap aspek lingkungan,
2. Pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi lokal (*self-management*).
3. Pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, namun sering kali ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan semua potensi yang dimiliki masyarakat agar mampu melawan serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan (Mardikanto, 2015- 75). Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil, dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi oleh salah satu atau beberapa pihak dalam suatu komunitas masyarakat. Dengan demikian maka pemberdayaan memiliki makna sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya sehingga mampu hidup secara mandiri dan sejahtera.

2.2.2 Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto dan Soebiato (2015) membagi tahapan kegiatan pemberdayaan menjadi beberapa tahapan yaitu :

1. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja. Sebelum melakukan kegiatan, harus ada kesepakatan antara *stakeholder* terkait seperti perwakilan masyarakat setempat, aparat pemerintah, akademisi, LSM, dll mengenai penetapan wilayah kerja. Hal itu penting dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan membangun sinergi dengan seluruh *stakeholder* yang ada demi keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilakukan.
2. Sosialisasi kegiatan. Merupakan upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Dalam sosialisasi kegiatan juga dikemukakan tentang pihak-pihak terkait yang akan diminta partisipasinya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan dan strategi yang akan dilakukan. Proses sosialisasi ini menjadi sangat penting karena akan menentukan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang akan dijalankan.
3. Penyadaran masyarakat. Tahapan kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya baik sebagai individu dan anggota masyarakat maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Termasuk juga di dalamnya upaya menunjukkan adanya masalah yang berkaitan dengan keadaan sumber daya dan lingkungan mereka. Selain itu juga dilakukan analisis bersama menyangkut potensi, faktor penyebab terjadinya masalah terutama kelemahan internal dan ancaman eksternal untuk selanjutnya merumuskan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaan.
4. Pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat ini penting dilakukan karena untuk melaksanakan perubahan guna

memecahkan masalah sering kali tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi memerlukan pengorganisasian masyarakat. Termasuk dalam tahapan ini adalah pemilihan pemimpin, pembentukan kelompok tugas, pembagian peran, dan pengembangan jaringan kemitraan.

5. Pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini terdiri dari berbagai kegiatan pelatihan untuk menambah atau memperbaiki pengetahuan dan kemampuan teknis, ketrampilan manajerial, dan perubahan sikap/wawasan. Pengembangan kegiatan terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan penting untuk membangun kemandirian dan menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa pemberdayaan yang dilakukan mampu memperbaiki kehidupan mereka.
6. Advokasi kebijakan. Kegiatan advokasi ini diperlukan guna memperoleh dukungan politik melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan juga legitimasi dari elit masyarakat.
7. Politisasi. Politisasi mengandung arti upaya terus menerus memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan politik praktis untuk memperoleh legitimasi.
 - a) Berdasarkan beberapa tahapan pemberdayaan yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tahapan penting yang harus dilewati dalam kegiatan pemberdayaan yaitu : identifikasi wilayah kerja termasuk karakteristik masyarakat dan tokoh-tokoh penting yang berpengaruh di dalamnya;
 - b) Sosialisasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan;
 - c) Penyadaran mengenai permasalahan yang terjadi termasuk analisa faktor penyebabnya, potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pentingnya perubahan dan menumbuhkan kepercayaan diri;
 - d) Perumusan pemecahan masalah atau program kegiatan;

- e) Pengorganisasian masyarakat; dan
- f) Pemberdayaan dalam bentuk penguatan kapasitas melalui pelatihan maupun pendampingan dan pemberian kesempatan untuk dapat berpartisipasi secara aktif hingga pada akhirnya masyarakat mampu melanjutkan kegiatan atau menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.

2.3 Tinjauan Aparat/aparatur

Aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan di samping faktor lain seperti uang, alat-alat yang berbasis teknologi misalnya komputer dan internet dan merupakan *asset* yang paling penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi pemerintah yang dimana untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan efisien dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Oleh karena itu, sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk mewujudkan profesional pegawai dalam melakukan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soeworno Handayani yang berpendapat bahwa, Aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek organisasi itu terutama pengorganisasian atau kepegawaian (Suwatno, 2001: 154).

Pamudji mendeskripsikan tentang konsep atau definisi mengenai aparatur sebagai berikut, sebagai alat atau sarana pemerintahan atau negara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang kemudian terkelompok kedalam, fungsi-fungsi diantaranya pelayanan publik, didalam pengertian aparatur tercakup aspek manusia (personil), kelembagaan (institusi), dan tata laksana (Pamudji, 2004: 21) Berdasarkan pendapat di atas, aparatur merupakan alat atau sarana pemerintah yang mencakup personil atau orang-orang, kelembagaan institusi dan tata laksana menjadi satu dalam kelompok untuk memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat yang dimana hasil dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Aparat/aparatur merupakan penyelenggara pemerintah yang menjalankan tugas pada roda pemerintahan untuk melayani masyarakat umum serta tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu kelompok/golongan. Adapun teori yang dikemukakan oleh Soerwono Handyaningrat (1982: 152) mengenai aparatur itu sendiri yaitu Aparatur merupakan keseluruhan pejabat negara atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya. Dari pandangan tersebut dapat dilihat bahwa aparatur merupakan seluruh anggota atau pejabat pemerintah yang menjalankan penyelenggaraan roda pemerintahan dalam melayani masyarakat umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Aparatur dengan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pencapaian tugas dan kewajiban yang dibebankan oleh negara. Aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, aspek organisasi itu terutama pengorganisasian atau kepegawaian, Soerwono Handyaningrat (1982: 154). Dari pandangan tersebut terlihat bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan atau telah direncanakan, maka perlu alat atau sarana dalam hal mempermudah pencapaian tujuan tersebut. Jika melihat dari teori di atas maka sarana dan alat yang digunakan adalah aparatur. Dikarenakan aparatur merupakan aspek-aspek yang sangat penting dan mutlak harus ada dalam pemerintahan untuk upaya membantu menciptakan atau menjalankan pemerintahan yang baik untuk terwujudnya tujuan nasional.

Dari beberapa pandangan para ahli mengenai konsep aparatur terlihat bahwa aparatur merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menjalankan suatu pemerintahan. Dikarenakan apabila pejabat negara dalam hal ini aparatur dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan baik dan sungguh-sungguh maka akan terciptanya pelayanan pemerintah yang baik. Adapun aparatur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparatur yang dapat menjalankan perannya dalam

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebutan untuk aparatur pemerintahan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi yang diperlukan suatu asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aparatur sipil negara dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen aparatur sipil negara seperti yang tertulis dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Bab 1, pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud ASN dalam undang-undang ini adalah:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini diharapkan dapat memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) tidak

lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. Aturan ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional. Selama ini pegawai negeri sipil tidak bisa bersikap netral, mudah terbawa arus politik dan perlu melakukan lobi untuk mendapat promosi jabatan.

2.4 Kerangka Pikir

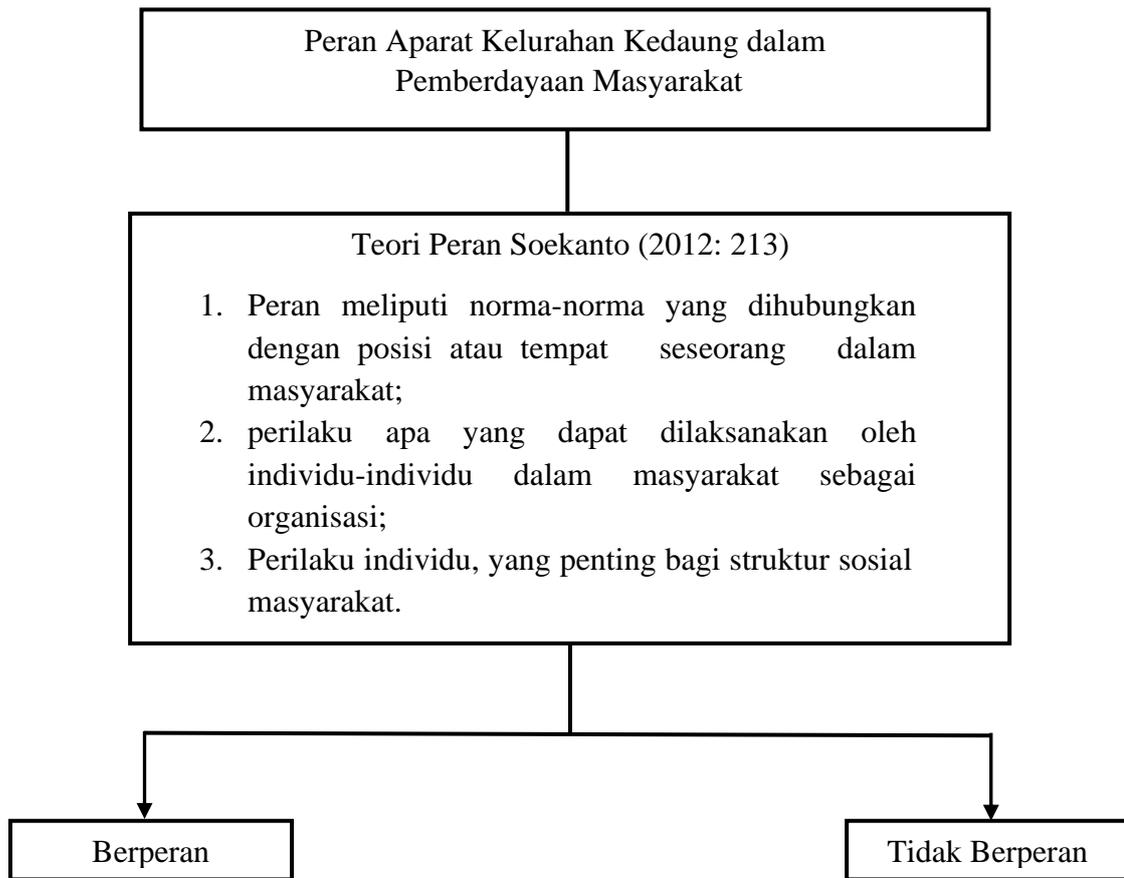
Peran Aparat Kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori peran Soekanto (2012: 213). Sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, aparat kelurahan memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat di tingkat lokal. Dalam menjalankan perannya, aparat kelurahan dihadapkan pada norma-norma yang terkait dengan posisi dan fungsi mereka sebagai pengelola pemerintahan tingkat kelurahan. Norma-norma ini mencakup tugas-tugas yang harus mereka laksanakan, seperti menyampaikan informasi dan kebijakan dari pemerintah pusat kepada masyarakat setempat, mengelola administrasi kelurahan, serta memastikan pelaksanaan program pemerintah di tingkat kelurahan.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peran aparat kelurahan adalah perilaku individu dalam konteks tugas-tugas dan fungsi mereka. Sebagai organisasi, aparat kelurahan harus dapat berperilaku sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Perilaku tersebut meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta merespons tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh warga setempat. Dalam hal ini, aparat kelurahan perlu memiliki sikap proaktif dan responsif terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Perilaku individu aparat kelurahan juga berperan penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Jika aparat kelurahan berperilaku dengan integritas, kejujuran, dan transparansi, mereka dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitar, mendorong adopsi perilaku positif dan berkontribusi pada terbentuknya lingkungan sosial yang harmonis dan mendukung. Di sisi lain, jika perilaku aparat kelurahan tidak sesuai dengan norma-norma yang diharapkan atau mereka tidak menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketidaksinambungan dalam pembangunan lokal.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, peran aparat kelurahan bukan hanya sebagai pelaksana tugas administratif semata, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi dan tantangan di tingkat kelurahan. Melalui kolaborasi dengan warga dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, aparat kelurahan dapat merumuskan program dan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan menggunakan teori peran Soekanto, analisis terhadap peran aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Dalam proses analisis tersebut, dapat dievaluasi sejauh mana aparat kelurahan berhasil berperan sesuai dengan norma-norma yang mengatur posisi dan tugas mereka dalam masyarakat. Selain itu, perilaku individu yang menunjang pemberdayaan masyarakat juga perlu dieksplorasi untuk menilai tingkat efektivitas dan keterlibatan aparat kelurahan dalam memajukan masyarakat setempat. Dengan demikian, pemahaman dan analisis yang mendalam mengenai peran aparat kelurahan dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta mengarahkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah Peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Aparat Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedaung Bandar Lampung” menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peran yang dijalankan oleh aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan kedaung sudah sesuai atau belum dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian tentang peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, bertujuan untuk memahami dan mendalami peran serta upaya aparat kelurahan dalam memberdayakan masyarakat secara holistik dan mendalam. Menurut Raco (2018) terdapat beberapa tujuan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini antara lain:

1. Menggali pemahaman yang mendalam tentang peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk cara-cara yang dilakukan, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

2. Mempelajari pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan.
3. Menjelaskan konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi dan membentuk peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Menjelaskan proses interaksi dan hubungan antara aparat kelurahan Kedaung dengan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang peran aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi atau solusi yang lebih efektif dan efisien dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedaung.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada peran yang dijalankan oleh aparat kelurahan apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kedaung. Dimana terkadang peran aparat kelurahan masih belum sesuai dengan tupoksinya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kedaung. Dengan menggunakan Teori Soekanto (2012: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dengan menggunakan teori peran Soekanto (2012: 213), fokus penelitian tentang peran aparat Kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat dapat difokuskan pada tiga aspek sebagai indikator untuk mengetahui seseorang menjalankan peranannya atau tidak (berperan atau tidak berperan), yaitu:

1. Norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat aparat kelurahan Kedaung dalam masyarakat. Penelitian dapat mengidentifikasi norma-

norma yang diharapkan atau dijadikan patokan dalam pelaksanaan peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini meliputi pengertian tentang tugas dan tanggung jawab aparat kelurahan Kedaung, serta etika dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh aparat kelurahan Kedaung dalam menjalankan perannya.

2. Perilaku yang dapat dilakukan oleh aparat kelurahan Kedaung sebagai bagian dari organisasi masyarakat. Penelitian dapat menjelaskan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh aparat kelurahan Kedaung sebagai bagian dari organisasi masyarakat, seperti upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, merencanakan program pemberdayaan masyarakat, melaksanakan program, serta melakukan evaluasi dan *monitoring* terhadap program tersebut.
3. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Penelitian dapat mengkaji perilaku individu dari aparat kelurahan Kedaung yang berkontribusi dalam membentuk struktur sosial masyarakat, seperti bagaimana aparat kelurahan Kedaung berinteraksi dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya, bagaimana aparat kelurahan Kedaung menghadapi dan mengatasi masalah dan konflik yang muncul dalam proses pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana aparat Kelurahan Kedaung berupaya memperkuat jaringan dan kerjasama dengan lembaga atau *stakeholder* terkait dalam mempercepat proses pemberdayaan masyarakat.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, karena melihat dari kondisi heterogennya masyarakatnya yang dimana dalam menjalankan pemberdayaan memerlukan penanganan yang tepat dari pemerintahan kelurahan setempat. Serta harus adanya dukungan peran dari masing-masing aparat kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Alasan memilih tempat di Kelurahan Kedaung sebagai lokasi penelitian tentang peran aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat adalah karena Kelurahan Kedaung merupakan salah satu kelurahan di Kota Bandar Lampung yang memiliki tingkat keterbelakangan dan kemiskinan yang masih cukup tinggi dan masyarakat kurang merasakan bagaimana peran aparat dalam pemberdayaan masyarakat serta berdasarkan observasi terdapat aparat yang bermalasan-malasan. Penelitian tentang peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif tentang upaya aparat kelurahan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah yang terpencil dan kurang berkembang. Selain itu, Kelurahan Kedaung memiliki karakteristik yang beragam dalam hal demografi dan sosial-ekonomi, seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta potensi sumber daya alam dan budaya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi di Kelurahan Kedaung dan kawasan sekitarnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan Tindakan melalui proses wawancara dan terdapat tambahan dari dokumen lain. Jenis data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer diambil dari peneliti kepada sumber tanpa sebuah perantara. Peneliti mencari dan menemukan sebuah data melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari bahan-bahan tertulis seperti, Undang-undang dan peraturan terkait, serta referensi tambahan dalam data penelitian.

3.5 Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Syahroni Rachman, S.Sos.	Sekretaris Lurah Kelurahan Kedaung
2.	Maria Rita, S.Sos.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
3.	Herawati, S.Sos.	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
4.	Rosa Damayanti, SE	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.	Ramli	Ketua RT 02 LK I
6.	Kusnadi Zainal	Ketua RT 03 LK II
7.	Sugiyono Darmawan	Masyarakat

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dalam penelitian mengenai peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat, pemilihan informan yang tepat sangat penting untuk memperoleh data yang berkualitas dan relevan dengan topik penelitian.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa informan tersebut dipilih dalam penelitian ini:

1. Pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian.

Informan dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, informan yang dipilih dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh aparat kelurahan Kedaung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Berbagai latar belakang dan perspektif

Informan dipilih dari berbagai latar belakang dan perspektif, seperti aparat kelurahan, masyarakat, serta pihak-pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh sudut pandang yang beragam dan melihat peran aparat kelurahan Kedaung dari berbagai sudut pandang.

3. Kerjasama dan keterbukaan informan

Informan dipilih berdasarkan kerjasama dan keterbukaan dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, kerjasama dan keterbukaan informan sangat penting untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam tentang peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi:

a. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak-banyaknya data yang masih dipertanyakan sebelumnya dengan tujuan untuk menggali, memperoleh informasi secara lengkap sesuai yang sebenarnya terjadi di lapangan yaitu mengenai peran aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan kedaung.

Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah Peneliti pilih sebelumnya. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang Peneliti lakukan:

1. Pada tanggal 22 Mei 2023 Peneliti mewawancarai Syahroni Rachman, S.Sos. sebagai Seketaris Lurah Kelurahan Kedaung pada pukul 09.00-10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
2. Pada tanggal 22 Mei 2023 Peneliti mewawancarai Maria Rita, S.Sos. sebagai Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada pukul 12.00-13.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
3. Pada tanggal 22 Mei 2023 Peneliti mewawancarai Herawati, S.Sos. sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada pukul 13.00-14.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
4. Pada tanggal 22 Mei 2023 Peneliti mewawancarai Rosa Damayanti, SE. sebagai Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada pukul 08.00-09.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
5. Pada tanggal 25 Mei 2023 Peneliti mewawancarai Ramli sebagai Ketua RT 02 LK I pada pukul 08.00-09.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
6. Pada tanggal 25 Mei 2023 Peneliti mewawancarai Kusnadi Zainal sebagai Ketua RT 03 LK II pada pukul 10.00-12.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
7. Pada tanggal 25 Mei 2023 Peneliti mewawancarai Sugiyono Darmawan sebagai masyarakat pada pukul 15.00-17.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Hasil wawancara setelah dianalisis oleh Peneliti menyatakan bahwa aparat Kelurahan Kedaung berperan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedaung.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan juga dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud untuk menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi atau pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan

pengamatan. Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2013).

Hasil kegiatan observasi yang dilakukan selama kurang lebih 5 bulan, Peneliti telah melakukan observasi intensif di Kelurahan Kedaung untuk mengamati kinerja aparat kelurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hasil observasi ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang bagaimana aparat kelurahan berperan dalam memajukan masyarakat setempat.

Salah satu temuan utama dari observasi ini adalah komitmen yang kuat dari aparat kelurahan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Mereka secara aktif melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pertemuan rutin di lingkungan kelurahan, diskusi kelompok, dan pemasangan spanduk informatif. Dalam setiap kesempatan, aparat kelurahan berusaha menyampaikan informasi dengan jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dan kesempatan yang ada dalam program pemberdayaan tersebut.

Selain itu, aparat kelurahan juga aktif melibatkan masyarakat dalam pembangunan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat desa. Dalam musrenbang, warga diberikan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan yang mereka harapkan. Aparat kelurahan dengan seksama mendengarkan setiap usulan yang diajukan oleh warga dan mencoba menelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program pemberdayaan yang telah direncanakan.

Namun, dalam observasi juga terlihat beberapa tantangan yang dihadapi oleh aparat kelurahan dalam menjalankan peran mereka. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal tenaga dan anggaran. Meskipun memiliki komitmen yang tinggi, terkadang aparat kelurahan kesulitan untuk melaksanakan program pemberdayaan secara optimal karena keterbatasan ini. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Meskipun demikian, hasil observasi ini menunjukkan bahwa aparat kelurahan Kedaung telah berusaha keras untuk mengoptimalkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Upaya mereka dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan merupakan langkah yang signifikan untuk mendorong partisipasi dan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Dengan memahami tantangan yang dihadapi, diharapkan aparat kelurahan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan berperan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik di Kelurahan Kedaung.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara. Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema serta rekaman suara pada saat wawancara dengan

narasumber pada saat melakukan penelitian. Berikut dokumen yang terdapat pada penelitian yang Peneliti lakukan, yaitu:

1. Wawancara dengan narasumber
2. Pelaksanaan pemberdayaan oleh aparat
3. SKP Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Editing

Proses *editing* merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan menjabarkan data melalui tahap *editing* dan kemudian diberi penjelasan dan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengorganisasikan data, memilah data, mencari dan menemukan pola serta menemukan data penting. Terdapat 3 komponen analisis data yang diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat atau direkam. Mereduksi disebut juga dengan merangkum hal-hal pokok yang akan dijadikan titik fokus penulisan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian data dalam penelitian kualitatif penyajian datanya dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa bagan, hubungan antar kategori dan berupa *flowchart* dan lain-lain.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, kemudian akan berubah-ubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung data pada tahap pengumpulan berikutnya.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kedaung

Kelurahan kedaung merupakan salah satu dari 9 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang terletak di bagian Barat dari Wilayah Kota Bandar Lampung dengan jarak \pm 4 Km dari Ibu Kota Provinsi. Kelurahan Kedaung terbentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala daerah TK.1 Lampung No.6/185/BHK/89 tentang perubahan Desa menjadi Kelurahan, Pemecahan dari 58 Kelurahan menjadi 84. Kelurahan Kedaung kecamatan Kemiling terbentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung No.4 Tahun 2001, semenjak berdirinya tahun 2002 sampai dengan saat ini Kelurahan Kedaung telah di pimpin oleh beberapa Lurah yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Nama – Nama Lurah di Kelurahan Kedaung

No	Nama	Periode	Keterangan
1.	Wahab Andi Wahid	2002 – 2005	
2.	Fathul Bachri	2005 – 2007	
3.	Junaidi. SP.	2007 – 2009	
4.	Hendro Soemansono, S.Sos	2009- 2012	
5.	Dedy Sutiyoso, ST, MT.	2012 – 2015	
6.	Yusuf Musa, S.Sos	2015 – 2018	
7.	Rosa Damayanti, SE	2018 – 2019	
8.	Kusuma Purwarintono, ST.,MM	2019 – 2023	PLT
9.	Buchori, SH	2023 – 2027	

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

4.1.1 Luas Wilayah

Luas wilayah kelurahan kedaung terdiri dari kawasan pegunungan dimana peruntukan tanah terdiri atas:

Jalan	: 10.675 Ha
Kuburan	: 2 Ha
Perkebunan	: 300 Ha
Pekarangan	: 130 Ha
Perkantoran	: 0,5

4.1.2 Batas Wilayah

Kelurahan kedaung memiliki luas wilayah 652 H dengan jumlah Penduduk 3.711 orang yang terbagi di dua lingkungan dan 13 RT dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Beringin Jaya
- b. Sebelah selatan Berbatasan Dengan Kelurahan Batu Putu Kec. TBB
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sumber Agung
- d. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Sukadanaham Kec. TKB

4.1.3 Kondisi Geografis

Secara geografis Kelurahan Kedaung berada pada ketinggian 1s/d 100 M di atas permukaan laut dimana kawasan Kedaung daerah pegunungan yang memiliki curah hujan antara 2.500 s/d 3.000 mm pertahun dan memiliki suhu rata-rata harian antara 25 – 32 Derajat celcius serta memiliki tekstur tanah berupa tanah berpasir dan tanah perbukitan serta tanah perkebunan.

4.1.4 Orbitrasi

- a. Jarak Kelurahan dengan Kecamatan Kemiling \pm 3 Km
- b. Jarak Kelurahan dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung \pm 6 Km
- c. Jarak Kelurahan dengan Pemerintah Provinsi Lampung \pm 7 Km
- d. Jarak Kelurahan dengan Kantor Polisi 3 Km
- e. Jarak Kelurahan dengan Puskesmas Rawat inap 2 Km
- f. Jarak Kelurahan dengan Koramil 6 Km

- g. Jarak Kelurahan dengan Pusat-pusat Pendidikan di kedaung 1-10 Km.

4.1.5 Tingkat Kesuburan Tanah

Tingkat kesuburan tanah di Kelurahan Kedaung sebagai daerah pegunungan sangat sesuai untuk jenis tanaman keras seperti coklat, sayuran melinjo sehingga jenis tanaman ini banyak dikembangkan diwilayah Kelurahan Kedaung sebagai tanaman pokok dibandingkan tanaman lainnya.

4.1.6 Sumber Daya Air

Kelurahan Kedaung sebagai kawasan yang terletak di dataran tinggi sehingga potensi air yang ada hanya 50%, di musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Kedaung mengandalkan sumur bor yang tersebar di beberapa tempat sehingga kebutuhan air masih dapat terpenuhi dengan baik.

4.2 Potensi Penduduk

- a. Jumlah Penduduk Kelurahan Kedaung Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Lingkungan I	1.324	1.294	2.618
2.	Lingkungan II	558	535	1.093
	Jumlah	1.882	1.829	3.711

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan Kedaung Berdasarkan Jumlah KK dan Jumlah Rumah

No.	Jumlah KK	Jumlah Rumah	RT/LK
1.	57	48	RT.001 LK.I
2.	154	139	RT.002 LK.I
3.	101	62	RT.003 LK.I
4.	181	136	RT.004 LK.I
5.	83	66	RT.005 LK.I
6.	45	40	RT.006 LK.I
7.	125	95	RT.007 LK.I
8.	107	93	RT.008 LK.I
Jumlah	853	679	-
1.	68	63	RT.001 LK.II
2.	79	72	RT.002 LK.II
3.	45	39	RT.003 LK.II
4.	70	60	RT.004 LK.II
5.	65	65	RT.005 LK.II
Jumlah	327	299	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kedaung cukup baik, karena jika dilihat dari tingkat perekonomian menengah keatas lebih banyak dari menengah kebawah baik dari segi pendapatan keluarga maupun lainnya hal ini dikarenakan mayoritas sektor perkebunan yang amat dominan dalam menunjang perekonomian di Kelurahan Kedaung.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Indikator	Jumlah
		2022
1.	Islam	3.710
2.	Kristen	1
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	3.711

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	INDIKATOR	Jumlah
		2022
1.	0 – 15 Tahun	1.180
2.	15 – 65 Tahun	2.607
3.	65 keatas	290
	Jumlah	4.077

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

Tabel 7. Jumlah Perpindahan Penduduk (Mutasi)

No	Mutasi	Jenis Kelamin	Jumlah
			2022
i.	Kematian	Laki-Laki	3
		Perempuan	2
		Jumlah	5
ii.	Pindah	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
		Jumlah	-
iii.	Kelahiran	Laki-Laki	9
		Perempuan	13
		Jumlah	22
iv.	Datang	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
		Jumlah	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	INDIKATOR	Jumlah
		2022
1.	Belum Sekolah	334
2.	Tidak Tamat SD/ Sederajat	-
3.	Tamat SD / Sederajat	405
4.	Tamat SMP/Sederajat	82
5.	Tamat SLTA/ Sederajat	35
6.	Tamat D1	-
7.	Tamat D2	-
8.	Tamat D3	-
9.	Tamat S1	3
10.	Tamat S2	-
11.	Tamat S3	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

Tabel 9. Jumlah Penduduk Wajib Belajar 9 Tahun dan Angka Putus Sekolah

No.	Jenis	Jumlah
		2022
1.	Usia 7 – 15 Tahun	245
2.	Usia 7 – 15 Tahun Masih Sekolah	245
3.	Usia 7 – 15 Tahun Putus Sekolah	619

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis	Jumlah
		2022
1.	PNS	100
2.	ABRI/POLRI	51
3.	Buruh	620
4.	Pensiunan ABRI/PNS/POLRI	10
5.	Tukang	150
6.	Pedagang	200
7.	Nelayan	-
8.	Jasa Lainnya	200
	Jumlah	1.331

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

Tabel 11. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis	Status	Milik	Jumlah
				2022
1.	Play Group	Terdaftar	Swasta	-
2.	Kober	Terdaftar	Swasta	-
3.	Paud	Terdaftar	Pemerintah	2
4.	SD	Terdaftar	Pemerintah	-
5.	SMP	Terdaftar	Pemerintah	-
6.	SLTA	Terdaftar	Pemerintah	1
7.	Lembaga Agama	Terdaftar	Pemerintah	-
8.	Kursus	Terdaftar	Perorangan	-

Sumber : Buku Profil Kelurahan Kedaung

Tabel 12. Jumlah Sarana Keagamaan

No.	Jenis	Jumlah
		2022
1.	Masjid	8
2.	Musholla	5
3.	Gereja	-
4.	Wihara/Klenteng	-
5.	Pura	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

4.3 Bidang Kesejahteraan Masyarakat

4.3.1 Tingkat Kecakupan Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi

Dari Data Tingkat kesehatan Masyarakat diatas apabila kita cermati maka ada keterkaitan yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pemukiman, konsumsi air bersih maupun terhadap sanitasi masyarakat yang ada diwilayah Kelurahan Kedaung, untuk lebih jelasnya mengenai tingkat kecukupan air bersih san sanitasi yang ada di Kelurahan Kedaung dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Tingkat Kecakupan Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi

No.	Uraian	Jumlah
		2022
1.	a. Jumlah Penduduk	3.977
	b. Jumlah KK	1.198
2.	Jumlah Yang Memiliki Rumah	
	a. Jumlah rumah seluruhnya	1.198
	b. Jumlah rumah sehat	1.100
	c. Jumlah rumah kurang sehat	98
3.	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	
	a. Menggunakan air sumur pompa/gali	-
	b. Menggunakan sumur bor	40
	c. Menggunakan PAM	-
4.	Hidran umum	-
	a. Jumlah rumah yang memiliki jamban/WC	1.198
	b. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki Jamban/WC	-
	c. Jumlah rumah tangga pengguna MCK	-
5.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Klinik KB	1
	a. Puskes pembantu	-
	b. Puskesmas rawat inap	1
	c. Posyandu	-
	d. Dokter praktik	1
	e. Bidan	-
	f. Balai pengobatan	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

4.3.2 Tingkat Perekonomian Masyarakat

Mayoritas tingkat perekonomian masyarakat Kelurahan Kedaung dapat diklarifikasikan sedang dan secara umum kondisi masyarakat di kelurahan kedaung banyak bertumpu pada sektor perdagangan jasa, berkebun, sektor perikanan sebagai mata pencaharian pokoknya hal ini dikarenakan topografi yang ada memungkinkan untuk usaha tersebut.

4.3.3 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kedaung cukup baik, karena jika dilihat dari tingkat perekonomian menengah keatas lebih banyak dari menengah ke bawah baik dari segi pendapatan keluarga maupun lainnya.

Adapun tingkat kesejahteraan masyarakat di kelurahan Kedaung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No	Uraian	Jumlah
		2022
1.	Jumlah Keluarga (KK)	1.198
2.	Jumlah Keluarga pra sejahtera	135
3.	Jumlah KS 1	76
4.	Jumlah KS 2	78
5.	Jumlah KS 3	64
6.	Jumlah KS 3 Plus	15

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedaung

4.3.4 Program Pemberdayaan Masyarakat

Program-program pemberdayaan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan ekologi. Berikut adalah beberapa contoh program pemberdayaan desa berdasarkan kategori tersebut:

1. Kategori Sosial:

- Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Masyarakat desa diberikan akses ke pendidikan formal dan pelatihan keterampilan praktis, seperti pertanian, kerajinan tangan, atau teknologi informasi. Ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta membuka peluang baru untuk pekerjaan atau usaha mandiri. Programnya yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Program Pengembangan Komunitas: Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan budaya lokal, seperti grup seni, kelompok baca, atau kegiatan gotong royong. Ini memperkuat ikatan sosial dalam komunitas dan mengurangi isolasi. Programnya yaitu Karang Taruna dan Rumah Belajar / Rumah Baca Anak Dini.
- Program Sosial Masyarakat: Masyarakat harus mendapatkan fasilitas kesehatan dan diikutsertakan dalam kegiatan yang bertujuan kepada pemberdayaan. Programnya yaitu Musrenbang, Apotik Hidup dan Penyuluhan Kesehatan.

2. Kategori Ekonomi:

- Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM): Memberikan pelatihan, modal usaha, dan dukungan teknis kepada warga yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil atau menengah di desa. Ini meningkatkan potensi ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Programnya yaitu Sosialisasi Pengembangan UMKM.

3. Kategori Ekologi:

- Pengelolaan Sampah: Mengajarkan cara pengelolaan sampah yang benar, termasuk daur ulang dan kompos, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembersihan lingkungan. Ini membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan desa. Programnya yaitu Bank Sampah.

- Program Pemanfaatan Lingkungan: Melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman tanaman herbal yang dapat diambil kapan saja kepada masyarakat yang membutuhkan. Programnya yaitu Apotik Hidup.
- Program Pengelolaan Pariwisata: Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lingkungan sekitar yang memiliki nilai ekonomis. Contohnya pariwisata Camp91.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Peran Aparat Kelurahan Kedaung dalam Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa aparat berperan dalam pemberdayaan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Norma aparat Kelurahan Kedaung dalam masyarakat

Norma yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu keterbukaan dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan dan tanggung jawab, kolaborasi dan kemitraan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Norma-norma tersebut berhasil diimplementasikan dan dijadikan patokan dalam pelaksanaan peran aparat dalam pemberdayaan masyarakat serta akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan tata Kelola pemerintahan yang baik.

2. Perilaku aparat Kelurahan Kedaung dalam masyarakat

Tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh aparat kelurahan Kedaung telah berhasil dalam pemberdayaan masyarakat walaupun dinilai lemah karena tidak ditemukannya data sebagai penguat argumentasi. Tetapi, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta evaluasi dan *monitoring* yang dilakukan oleh aparat kelurahan telah memberikan dampak positif dan memberdayakan masyarakat secara efektif.

3. Perilaku penting individu dalam struktur sosial masyarakat

Keberhasilan aparat Kelurahan Kedaung sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat tercermin dalam dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasakan peningkatan akses terhadap layanan publik, peningkatan kualitas hidup, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan keterlibatan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, aparat Kelurahan Kedaung telah berhasil menjadi individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat dalam konteks pemberdayaan. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dalam peran dan tugas mereka sebagai aparat pemerintahan, tetapi juga dalam kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang harmonis dan memberdayakan masyarakat secara holistik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat Peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keberhasilan implementasi norma-norma seperti keterbukaan dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan dan tanggung jawab, kolaborasi dan kemitraan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedaung, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, penting untuk menjaga kontinuitas dan melakukan perbaikan terus-menerus dalam program pemberdayaan masyarakat melalui evaluasi berkala dan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, diperlukan penguatan kapasitas bagi aparat dan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pemahaman mereka tentang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program. Penguatan kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga terkait juga perlu dilakukan untuk memperoleh dukungan,

pengetahuan, dan sumber daya tambahan. Terakhir, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan menyediakan layanan publik yang responsif dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam lingkungan pemberdayaan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan peran aparat dalam pemberdayaan masyarakat dapat semakin berhasil, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan keberhasilan tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, penting untuk terus mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan forum partisipatif, pertemuan rutin, dan saluran komunikasi yang terbuka. Kedua, aparat kelurahan perlu terus mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat secara komprehensif dengan melakukan survei, wawancara, dan pengumpulan data lainnya. Hal ini akan membantu mereka merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, perlu dipertahankan upaya dalam perencanaan program yang baik, termasuk penentuan tujuan yang jelas, alokasi sumber daya yang memadai, dan pengaturan tugas yang efisien. Keempat, pelaksanaan program harus terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, memberikan pelayanan yang responsif, dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana. Terakhir, evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan harus dilakukan untuk mengukur dampak program, mengidentifikasi keberhasilan dan kendala, serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini secara konsisten, diharapkan aparat kelurahan Kedaung dapat terus berhasil dalam pemberdayaan masyarakat dan memperkuat dampak positif yang telah dicapai.

3. Rekomendasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan aparat Kelurahan Kedaung sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat tercermin dalam dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasakan peningkatan akses terhadap layanan publik, peningkatan kualitas hidup, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan keterlibatan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Untuk memastikan kelanjutan keberhasilan ini, perlu dilakukan beberapa rekomendasi. Pertama, penguatan kompetensi aparat Kelurahan Kedaung melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen konflik. Kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan program dan evaluasi serta mengadakan pertemuan rutin untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ketiga, pentingnya akses terhadap informasi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang program pemberdayaan dan kebijakan publik. Keempat, membangun kolaborasi dan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk memperluas sumber daya dan dukungan. Terakhir, melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki program dan meningkatkan pembelajaran. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, aparat Kelurahan Kedaung dapat terus berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu., & Narkubo, Cholid. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Boyte, H. C., & Kari, N. N. (1996). *Building America: The democratic promise of public work*. Temple University Press.
- Haryati, Yeti., & Muhsin, Mumuh. (2014). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hood, C. (2000). *The art of the state: Culture, Rhetoric, and Public Management*. Oxford University Press.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, K. (2014). *Antropologi hukum*. Antropologi Indonesia.
- Lexy J. Moleong. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto, T. (2015). *Poerwoko soebiato. Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and schuster.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
- Raho, Bernard. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rawls, J. (2020). *A theory of justice: Revised edition*. Harvard university press.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Surjono, A. (2008). *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Weber, M. (2009). *From Max Weber: essays in sociology*. Routledge.

Widjajanti, K. (2011). *Model pemberdayaan masyarakat*.

Jurnal

Ahmad, A., & Afni, N. (2022). *Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Nelayan (Kelompok Nelayan) di Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(05), 149-156.

Andini, G., Kurniansyah, D., & Febriantini, K. (2022). *Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Kerawang Kulon*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2055-2062.

Bandura, A. (1977). *Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change*. *Psychological Review*, 84(2), 191.

Barnett, E., & Casper, M. (2001). *A Definition of Social and Environment*. *American Journal of Public Health: Vol. 3, No. 3*.

Brown, A. D. (2019). *Identities in Organization Studies*. *Organization Studies*, 40(1), 7-22.

Davis, B. C., Gupta, S., Angeles, L., Aga, D. S., ... & Vikesland, P. J. (2021). *Evaluation of Metagenomic-enabled Antibiotic Resistance Surveillance at a Conventional Wastewater Treatment Plant*. *Frontiers in microbiology*, 12, 657954.

Deswimar, D. (2014). *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan*. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52.

Doe, J. (2023). *A Case Study Analysis of Management Practices in Australian Companies*. *Tec Empresarial*, 18(1), 225-237.

Hengky Wahyu S. 2008. *Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Studi tentang pelkasnaan program kredit petani miskin (KPM) di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban*. *Government Science*

Kartasasmita, G.1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES

Prijono, O (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Samah, A.A., & Aref, F. 2009. *Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia*. *World Rural Observation*, 1 (2): 63-68.

- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). *Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Smith, S., & Leedham-Green, K. (2020). *Factors impacting on retention, success and equitable participation in clinical academic careers: a scoping review and meta-thematic synthesis*. *BMJ open*, 10(3), e033480.
- Sutawa, G. K. (2012). *Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development*. *Procedia economics and finance*, 4, 413-422.
- Haryani, T., & Kuswoyo, S. (2022). *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut*. *Jurnal Sociopolitico*, 4(1), 36-48.
- Wijayanti, Astri. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Yeti, Yudiyanti. (2014). *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Sommunity Based Tourism)*.
- Zulkarnain, M. (2018). *Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa*. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 103-11.

Tugas Akhir

- Andriyani, Mirna. (2015) *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Balqis, A. S. (2023). *Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Home Industri Ceplis 'Nabil Jaya' (studi di Link, Ketileng Barat No. 122, RT. 14/RW. 02, Ketileng, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Efendi, R. (2023). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Mencegah Pelanggaran Badan Ad Hoc (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)*.
- Haryani, T., & Kuswoyo, S. (2022). *Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut*. *Jurnal Sociopolitico*, 4(1), 36-48.
- Julianto Salonga Palangan, J. (2020). *Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mentoriku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).

- Kasani, M. Y. (2013). *Peran Kepala Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kelurahan Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Marpaung, G. E. (2022). *Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun)*.
- Musdalifah. (2020). *Motivasi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompo Hulu Kabupaten Bantaeng*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Wahyu Saputro, H. (2007). *Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Tentang Pelaksanaan Program Kredit Petani Miskin (KPM) di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Zuhaqiqi (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Studi kasus Desa Salur Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dokumen

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 73 Tentang Kelurahan